

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dataran tinggi Tibet sering disebut juga sebagai "*Third Pole*", dikarenakan wilayah ini memiliki hamparan glasial dan cadangan air tawar yang melimpah. Tibet kemudian menjadi *upstream* dari sembilan negara di wilayah sekitarnya yang mengandalkan aliran sebagai komoditas kebutuhan sumber daya, kemudian hal ini menjadikan status aliran *upstream-downstream* sungai yang muncul dari dataran tinggi Tibet ini menjadi perhatian utama secara geopolitik. Kemudian, untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, Tiongkok telah mengklaim kepemilikan atas perairan Tibet dan menjadikan Tiongkok sebagai pengontrol hulu dari sungai-sungai terbesar di Asia yang mengelilinginya. Tindakan dari Tiongkok sebagai pengontrol ini kemudian berkaitan dengan sumber daya air dan merupakan salah satu isu yang paling kompleks untuk di bahas. Tantangan sumber daya air untuk pembangunan Tiongkok sangat kompleks, dikarenakan hal ini mencakup perpaduan antara dimensi geografis, politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini dikarenakan memerlukan penjelasan mengenai akar dari penyebab tantangan sumber daya air Tiongkok, kemudian menilai respons kebijakan pemerintah Tiongkok hingga saat ini, dan akhirnya kebijakan tersebut akan berimplikasi terhadap negara-negara sekitarnya.

Melalui Tibet, Tiongkok menegaskan Tibet sebagai aset wilayah strategisnya untuk mempercepat kebijakan ekspansionis Tiongkok terhadap negara-negara Himalaya dan sekitarnya. Tiongkok melihat Tibet sebagai jalur strategis untuk memperluas ambisi geopolitik Tiongkok dan tindakan yang dilakukan oleh pendudukan Tiongkok di dataran tinggi Tibet ini memicu ketegangan geopolitik di Asia (Sigurdson, 1977). Hal ini tidak terlepas dari faktor seorang Mao Zedong, pendiri dari Tiongkok dan sangat percaya pada doktrin strategis Tsun Tzu "*the Art of War*", dan kemudian mengimplementasikannya dengan menyusun strategi melalui Tibet sebagai kekuatan Tiongkok untuk memperluas lingkup pengaruhnya di Asia. Strategi dari Tiongkok melalui Tibet ini kemudian membentuk kebijakan *palm and five-fingers policy* yang bertujuan untuk integrasi wilayah sekitar Himalaya ke dalam supremasi Tiongkok

(Dorji, A Geo-strategic Importance of Tibet: China's "Palm and Five-Fingers Strategy", 2020). Klaim Tiongkok atas Tibet saat ini sepenuhnya didasarkan pada pengaruh yang dilakukan kaisar Mongol dan Manchu atas Tibet pada abad ketiga belas dan kedelapan belas, secara aspek historis. Kemudian atas klaimnya tersebut, Tiongkok mendapatkan *status quo* atas Tibet melalui okupansi militernya pada tahun 1950 yang bernama "*Peaceful Liberation of Tibet*". Untuk mempertegas jurisdiksinya terhadap Tibet, Tiongkok membentuk kerangka hukum untuk menggabungkan Tibet ke dalam teritori milik Tiongkok (Goldstein, Childs, & Wangdui, 2010). Komponen utama pembentukan kerangka hukum ini adalah penandatanganan *Seventeen Point Agreements*, yang sekali lagi membuat posisi Tiongkok dalam status kedaulatan Tibet menjadi sangat jelas. Dalam kerangka perjanjian ini, Tiongkok kemudian memberlakukan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kepentingan Tiongkok atas Tibet (Carlson, 2004).



Sumber Gambar: Tibetanreview.net

Singkatnya, kepentingan Tiongkok akan Tibet tidak luput dari permasalahan sumber daya air dan memiliki korelasi yang penting. Tantangan sumber daya air di Tiongkok terdiri dari masalah kuantitas dan kualitas air, yang masing-masing menghadirkan tantangan tersendiri bagi kebijakan dari Tiongkok untuk mengatasinya. Pemerintah Tiongkok di lihat sebagai negara yang menerapkan strategi pengelolaan sumber daya air yang paling ambisius di dunia, terutama menyangkut kepentingannya di Tibet yang disebut sebagai "*Water Tower of Asia*". Tibet kemudian menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok dalam menunjang kepentingannya di kawasan Asia (Hillman, 2009). Tibet menjadi salah satu komponen penting

dalam geopolitik Tiongkok dan menjadi bagian dari tepi barat Tiongkok sehingga menjadikan penghubung penting antara Tiongkok, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Seperti wilayah Xinjiang, Tibet merupakan jalur perdagangan kuno yang diperebutkan semenjak abad ke-7 hingga abad ke-20.

Kontrol Tiongkok atas Tibet memungkinkan untuk tidak hanya mempengaruhi masyarakat dan Diaspora Tibet di seluruh dunia, hal ini juga memberikan Tiongkok kekuatan besar untuk melakukan praktik “*water blackmail*” ke negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dataran Tinggi Qinghai-Tibet merupakan sumber dan penyimpanan air penting bagi Tiongkok, dikarenakan pada saat ini Tiongkok sumber airnya tidak merata dan dalam krisis untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Gletser dari dataran tinggi bersalju Tibet menjadi sumber dari sungai-sungai besar Asia, yaitu Brahmaputra, Mekong, Yangtze, Indus, Yellow, dan Salween. Sumber daya air dari Tibet telah menjadi salah satu sumber daya komersial pertama sejak kereta api Qinghai-Lhasa terbentuk pada tahun 2006 (Mendis, 2021).

Tiongkok melanjutkan eksploitasinya akan sumber daya Tibet ketika melakukan eksplorasi sumber daya dan membangun bendungan pada tahun 2006, pasca Tiongkok berhasil menyelesaikan jalur kereta api yang menghubungkan Golmud dan Lhasa. Atas hal tersebut, Tiongkok membentuk kebijakan manajemen sumber daya air melalui Tibet dan berimplikasi serta berpengaruh terhadap relasinya dengan negara-negara sekitar. Kebijakan yang dibentuk oleh Tiongkok ini berkaitan dengan kepentingan dari *water security* dari Tiongkok yang sedang mengalami krisis air. Krisis air yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian manajemen sumber daya air selama bertahun-tahun dan kurangnya tekanan terhadap Tiongkok atas tindakannya di Tibet. Tindakan ini mempersenjatai Tiongkok dengan peningkatan pengaruh atas negara-negara yang sangat bergantung pada aliran sungai dari Dataran Tinggi Tibet.

Secara keseluruhan, Tiongkok memiliki sumber daya air yang cukup besar, yang dimana Tiongkok menjadi salah satu negara dengan penghasil sumber air bersih nasional terbesar kelima di dunia. Sejalan dengan penyesuaian kebijakan nasional dan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, konsep dan kebijakan pembangunan air sedang dimodifikasi di Tiongkok. Artinya, mengubah pola pembangunan air dari berorientasi pembangunan proyek menjadi berorientasi pada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan (Yong, 2006). Namun, dalam implementasinya, ambisi dari Tiongkok ini

menimbulkan konflik dan tensi terhadap negara lainnya dikarenakan tindakan dari *water policies* dari Tiongkok merupakan sebuah monopoli untuk negara lainnya yang memanfaatkan aliran air dari Tibet juga.

Untuk mengatasi hal tersebut, Tiongkok telah mendorong reformasi pengelolaan sumber daya air seperti, konservasi air, dan daur ulang. Beberapa di antaranya sedang dilakukan, namun belum memenuhi rencana. Untuk mengatasi permasalahan domestiknya, Tiongkok lebih memilih untuk mengembangkan kebijakan yang berpusat pada desalinasi, pemanfaatan sumber daya karst, dan Strategi Pengalihan Air Selatan-Utara. Hal ini dilatarbelakangi oleh dikarenakan Tiongkok memiliki masalah keamanan air yang dapat menimbulkan ancaman eksistensial (Economy, 2012). Untuk memitigasi permasalahan tersebut, Tiongkok berkonsentrasi pada pembangunan nasional, mengelola untuk menyelesaikan masalah baru yang muncul, dan mempersiapkan diri untuk tantangan baru. Karenanya, Tiongkok melihat Tibet sebagai batu loncatan untuk memenuhi pembangunan nasionalnya, seperti membangun bendungan, *hydropower*, dan kebijakan eksploitasi sumber daya air lainnya dengan memanfaatkan Tibet.

Tiongkok untuk memenuhi kepentingan dan sekuritisasi airnya atas Tibet, kemudian membangun bendungan-bendungan besar yang bertujuan sebagai penampungan cadangan air maupun pembangkit listrik untuk negaranya. Bendungan ini kemudian juga dikhususkan untuk peralihan aliran air yang mengalir dari Tibet ke provinsi-provinsi Tiongkok di Utara dan Barat. Selain itu, pembangunan bendungan-bendungan yang dilakukan Tiongkok memiliki dampak yang besar terhadap aliran sungai Mekong. Tindakan dari Tiongkok ini kemudian dipertegas dengan posisi dari Tiongkok yang menolak Konvensi tentang Penggunaan Non-Navigasi dan Aliran Sungai Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses*), dikarenakan Tiongkok beranggapan bahwa konvensi tersebut menginterupsi kepentingan Tiongkok mengenai kedaulatan atas suatu wilayah dan eksploitasi sumber daya dari wilayah tersebut, dan kemudian penolakan dari Tiongkok ini juga berkaitan dengan pembangunan mega proyek bendungan-bendungan Tiongkok. Pembangunan bendungan menjadi komoditas yang begitu penting bagi Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan akan keamanan sumber daya airnya yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri Tiongkok yang terus berkembang.

Topografi di hulu sungai secara geostrategis menguntungkan Tiongkok untuk membangun bendungan karena memiliki potensi selain sumber air juga sebagai sumber energi listrik. Kebijakan-kebijakan ini kemudian berdampak terhadap citra dari Tiongkok, yaitu dianggap sebagai negara hulu yang mengeksploitasi sebanyak-banyaknya keuntungan dari *transboundary water resource* (sumber air lintas batas), dan berimplikasi menyebabkan kerusakan yang merugikan ke negara-negara hilir, dari kasus ini adalah negara-negara riparian Sungai Mekong. Hal ini kemudian berkaitan dengan pemanfaatan secara geostrategis yang dilakukan oleh Tiongkok. Dalam pandangan geostrategis, geostrategis merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh negara untuk memanfaatkan keadaan geografisnya sebagai landasan untuk menentukan kebijakan, pembangunan, dan pencapaian kepentingan nasional. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu alasan Tiongkok membangun bendungan-bendungan yang nantinya akan terkait pada kepentingan sumber daya strategis dari Tiongkok itu sendiri.

Tindakan kontroversi Tiongkok merupakan representasi dari geopolitik dan geostrategis dalam percaturan politik internasional. Potensi yang melimpah dan strategis sebagai negara hulu telah menjadikan relasinya dengan negara-negara hilir Sungai Mekong tersebut berstatus konflik. Semenjak tahun 1993, Tiongkok telah berhasil membangun 11 bendungan dari total proyeksi pembangunan 21 di aliran utama di Sungai Mekong, yang dikenal sebagai Lancang di Tiongkok. Pembangunan dan pendayagunaan bendungan ini telah menimbulkan banyak kekhawatiran dari negara-negara Sungai Mekong tentang bagaimana bendungan ini akan berdampak pada sungai sebagai komoditas utama mereka. Dengan dua bendungan penyimpanan air terbesar, yaitu Xiaowan dan Nuozhadu, dampaknya sering menjadi perhatian utama di wilayah tersebut (Sinha, 2011). Dalam pengelolaan sumber daya air, Tiongkok terus bertindak secara sepihak dan hal ini menyebabkan pola perubahan sumber daya air yang tidak menentu dan merugikan negara-negara hilir.

Permasalahan ini kemudian menimbulkan tantangan baru dalam menavigasi kerja sama dengan negara-negara riparian. Hanya empat dari enam negara daerah aliran Sungai Mekong yang menjadi pihak dalam Perjanjian 1995, yaitu Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, tidak termasuk Tiongkok sebagai negara hulu. Ketergantungan negara-negara riparian pada sumber daya air di Mekong ditentukan oleh hubungan hulu-hilir yang tidak setara. Ketimpangan hulu-hilir ini kemudian menimbulkan masalah krusial bagi keempat negara tersebut karena berkaitan

dengan hak dan kepentingan nasionalnya. Keterkaitan isu ini berkorelasi langsung dengan keberadaan geopolitik masing-masing negara di kawasan dalam menentukan kekuatan geopolitiknya. Di sisi lain, Tiongkok dengan segala ketergantungannya pada sumber daya air memiliki strategi untuk menekan dan memanfaatkan pengaruhnya terhadap negara hilir untuk ekspansi geopolitik.

Ekspansi pengaruh dari Tiongkok ini kemudian menyebabkan eskalasi tensi hidropolitik terhadap keempat negara riparian. Untuk Laos, sebagai negara *land-locked* bergantung pada energi berbasis *hydropower*. Hal ini dimanfaatkan Tiongkok dan menyebabkan Laos dalam permasalahan *debt-trap diplomacy* dikarenakan adanya ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok. Hal ini dapat dilihat semenjak tahun 2020 Tiongkok mengambil alih jaringan listrik domestik Laos. Bagi Thailand, mereka memosisikan diri menjadi oposisi terhadap pembangunan bendungan di hulu Sungai Mekong dikarenakan telah mengalami banjir dan kekeringan yang tidak biasa disebabkan oleh kebijakan Tiongkok tersebut. Thailand melihat kebijakan Tiongkok sebagai salah satu cara menekan untuk menerima klaim geopolitiknya.

Bagi Kamboja, pembangunan bendungan di hulu Sungai Mekong juga menyebabkan kerusakan bagi penduduk yang menempati daerah sepanjang aliran Sungai Mekong. Pembangunan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Kamboja merupakan salah satu kerangka BRI yang diinisiasikan dalam bentuk pembangunan bendungan *hydropower* Lower Sesan 2, yang dimana bendungan ini dimiliki Tiongkok sebelum pada akhirnya akan diberikan kepada Kamboja 40 tahun kemudian. Dan yang terakhir kemudian bagi Vietnam, sebagai negara yang paling hilir dari Sungai Mekong adalah negara yang paling rentan. Efeknya memperkirakan bahwa Vietnam dapat mengalami kerugian karena dampak negatif bendungan pembangkit listrik tenaga air yang dibangun oleh negara hulu. Vietnam cemas tentang kepentingan di Mekong yang dilakukan Tiongkok, menggambarkan Sungai Mekong sebagai "front kedua" setelah Laut China Selatan dalam perjuangan geopolitik Vietnam melawan Tiongkok.

Pada dasarnya, negara-negara riparian Sungai Mekong telah berusaha untuk membentuk kerangka agar keamanan air Sungai Mekong dapat terjaga melalui kerja sama dan juga kebijakan-kebijakan yang di bentuk melalui inisiasi dari MRC. Hidropolitik dari

hubungan yang terjalin antar negara riparian untuk menjaga keamanan air juga menjadi permasalahan yang akan di atasi melalui inisiasi multilateral tersebut. Dengan adanya kerja sama yang terjalin di sepanjang jalur Sungai Mekong melalui MRC seharusnya stabilitas keamanan air dapat terjaga karena adanya proses dan mekanisme yang konstruktif mengenai *water-sharing* terhadap negara-negara riparian. Namun, pada nyatanya stabilitas keamanan air di kawasan tersebut terjadi degradasi dan tidak dapat terjaga dikarenakan adanya kebijakan geostrategis yang dikeluarkan oleh Tiongkok sebagai negara hulu. Hal ini memberikan dampak terhadap kerja sama dan inisiasi yang dibangun oleh negara-negara riparian dan berdampak terhadap permasalahan sumber daya air negara-negara riparian.

Dalam penyusunan penelitian ini dan sebagai dasar untuk memperkuat argumen, penulis mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu dan meninjau penelitian-penelitian tersebut secara komprehensif untuk mendukung data penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai bentuk pembuktian dari argumen penulis dan memiliki keabsahan untuk diteliti. Dalam hal ini, secara terstruktur penulis menyusun tinjauan dimulai dari geopolitik dan geostrategis Tiongkok di Tibet, lalu mengenai hidropolitik Tiongkok dan pengaruhnya terhadap keamanan air negara-negara riparian Sungai Mekong.

Penjelasan mengenai peranan dari **Tiongkok di Tibet** dijelaskan oleh Dawa Norbu (2008) yang menganalisa strategi geopolitik Tiongkok di Tibet dan berfokuskan kepada sejarah kontestasi yang menjadikan Tibet sebagai lokasi strategis di Asia. Tibet dianggap sebagai ‘*Great Game*’ antara Rusia, Inggris, dan Tiongkok. Dan kemudian setelah meletusnya perang Sino-India, Tibet menjadi wilayah kontensi antara Tiongkok dan India dari tahun 1950 hingga sekarang. Norbu kemudian menfokuskan kontestasi geopolitik di Tibet melalui sudut pandang kebijakan Persepsi Strategis Tiongkok di Tibet. Kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut menjadikan Tibet sebagai *buffer zone* diantara perbatasan negara. Tibet diinisiasikan sebagai *backdoor defense* oleh Tiongkok, dan jika pengaruh Tiongkok lepas dari Tibet maka segala macam pengaruh dan intervensi asing akan menembus Tiongkok. Tibet menjadi daerah terpenting karena berbatasan langsung dengan Yunnan dan Szechuan.

Untuk memperkuat hegemoninya akan Tibet, Tiongkok kemudian mulai membangun banyak proyek pembangunan seperti jalan raya, bandara, jalur kereta api, bendungan sebagai cadangan air, dan lainnya. Hal ini direalisasikan melalui *First Five Year Plan* Tiongkok di

Tibet dan strategi ini dinilai sebagai bentuk integrasi wilayah dan juga integrasi ekonomi. Bryan Tilt dan Drew Gerkey (2016) menganalisa mengenai peran Tiongkok sebagai negara *upstream*. Tiongkok saat ini menjadi negara yang memiliki setengah dari bendungan besar dunia, Tiongkok membangun bendungan-bendungan setiap tahun sebagai sarana untuk irigasi, navigasi sungai, pengendalian banjir, dan yang paling penting adalah pembangkit listrik tenaga air. Di bawah kebijakan yang dikenal sebagai “*Send Western Electricity East*” sebagian besar pembangkit listrik tenaga air Yunnan diangkut lebih dari 1500 km jauhnya ke kota-kota pesisir di Provinsi Guangdong.

Hal ini merupakan hasil dari berhasilnya pembangunan empat bendungan yang mulai beroperasi semenjak tahun 2010. Selain itu, segmen paling utara dari *uper-stream* Mekong yaitu Yunnan dan wilayah Tibet, ditargetkan untuk menjadi sumber aliran air untuk bendungan yang dibangun, sekitar lima hingga sebelas bendungan. Ekspansi pembangkit listrik tenaga air Tiongkok didorong oleh pertumbuhan luar biasa dalam permintaan energi di domestik negaranya dan juga kebijakan pemerintah pusat yang mempromosikan sumber energi baru. Provinsi Yunnan di barat daya telah ditetapkan sebagai salah satu dari tiga belas pangkalan pembangkit listrik tenaga air utama bagi negara tersebut, dan Sungai Mekong, yang bermuara di Dataran Tinggi Qinghai-Tibet pada ketinggian 5224 Meter, merupakan salah satu rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga air di kawasan itu. Thomas Ptak (2017) menjelaskan pergerakan Tiongkok terhadap kebijakan geopolitiknya di Tibet terutama pembangunan-pembangunan bendungan di sepanjang hulu dan relasinya dengan negara hilir, terutama Sungai Mekong. Tiongkok dinilai memiliki kemampuan untuk melahirkan dan menyebarkan kekuasaan, baik itu secara *soft power* maupun *hard power* terutama dalam hubungan dengan negara bagian atau teritori lain.

Ptak kemudian berargumen bahwa kebijakan Tiongkok bersifat negara-sentris. Dalam menganalisa kebijakan Tiongkok, sangat penting untuk membuat manifestasi tertentu untuk dianalisis. Hal ini dikarenakan Tiongkok mencerminkan gagasan imajiner tentang "tanah air", yang dipromosikan secara besar-besaran melalui retorika "negara". Gagasan ini kemudian membentuk ini dari konsep geopolitik dan geoekonomi seperti hegemoni, dependensi, dan neo-liberalisme menjadi pemikiran utama dalam bangkitnya kekuatan Tiongkok. Ptak mengkaitkan unsur geopolitik Tiongkok dengan pemahaman yang lebih holistik tentang peran Tiongkok dalam konsep *transboundary water agreements*, melalui pengertian dari *hydro-hegemony*.



Konsep ini memberikan pemahaman dan pemikiran dari negara mealakukan hidropolitik yaitu ‘negara hulu menggunakan air untuk memperoleh kekuatan, negara hilir menggunakan kekuatan untuk mendapatkan air’.

Li Zhifei dan Fengshi Wu (2016) menganalisa berbagai jenis tantangan yang berada pada permasalahan *transboundary water* yang dihadapi oleh Tiongkok, dan berpendapat bahwa, selain faktor geopolitik, regulasi air domestik yang tidak memadai dan partisipasi yang rendah dalam tata kelola air global juga menyebabkan kurangnya terobosan besar dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas Tiongkok. Kemudian, strategi dari Tiongkok ini berkaitan dengan tujuan *12th National Five-Year Plan*, yang dimana pemerintah Tiongkok mengumumkan rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga air besar di sungai-sungai besar di provinsi barat dayanya dan menyebabkan negara-negara hilir sangat waspada. Meskipun Tiongkok telah lama menyerukan kebijakan ‘*good-neighbourliness and friendship*’ (*mulin youhao*), dan telah menginisiasi *One-Road-One-Belt Initiative* untuk ‘*foster an amicable, stable and prosperous neighborhood*,’ tapi tetap saja, banyak negara tetangga masih menganggap Tiongkok sebagai ancaman keamanan utama.

Permasalahan yang dihadapi oleh Tiongkok ini kemudian juga dikarenakan kebijakan dari domestiknya. Tiongkok merupakan negara yang partisipasinya rendah di dalam Tata Kelola Air Global. Tiongkok bergabung dengan beberapa negara hulu lainnya untuk memilih menentang 1997 *United Nations Convention on Law of Non-Navigation Use of International Watercourse* (UNWC) dan Tiongkok lebih memilih solusi bilateral daripada badan pembuat keputusan multilateral dan konvensi yang mengikat secara hukum terkait dengan masalah air lintas batas.

Philip Hirsch (2016) mengeksplorasi keterkaitan hubungan Tiongkok di Sungai Mekong dengan berbagai fenomena sosial dan politik, dengan alasan sungai harus dipahami sebagai konsep multi-dimensi, bukan sekadar permasalahan aliran sungai. Tiongkok berusaha untuk menempatkan sungai lintas batas dan cekungannya dalam geografi politik wilayah yang dibangun, sebagai sarana untuk mengeksplorasi dan dependensi jalur yang membentuk hasil pembangunan. Mekong telah berkembang dari sungai bersama ke lembah yang dibatasi secara teritorial, kemudian menjadi zona aktivitas ekonomi liberal yang lebih luas yang mengikat ekonomi nasional lintas batas, berkembang menjadi zona perbatasan, dan kemudian menjadi

arena kontestasi eksploitasi sumber daya. Tindakan Tiongkok di Mekong terutama pembangunan bendungan di hulunya, dapat dipahami sebagai tindakan untuk mengimplementasikan gagasan hegemoni sub-regional.

Hal inilah yang kemudian memengaruhi bagaimana Mekong menjadi kontestasi pembangunan. Tiongkok yang superior membangun bendungan di hulunya memengaruhi relasinya dengan negara-negara yang tergabung di dalam MRC. Selanjutnya untuk menjelaskan peranan **Tiongkok dalam hidropolitiknya** dengan negara hilir, Xue Gong (2020) berasumsi bahwa dalam kebijakan strategisnya, Tiongkok tampaknya memiliki minat yang kuat untuk mengamankan hubungan yang kuat dengan Asia Tenggara. Baik Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam kerja samanya mengusung konsep *Non-Traditional Security* (NTS). Bagi ASEAN, NTS adalah area kerja sama keamanan yang memungkinkannya menggerakkan agenda arsitektur keamanan yang melibatkan kekuatan ekstra-regional. Bagi Tiongkok, agenda kebijakan NTS memungkinkannya untuk mendapatkan penerimaan di antara negara-negara anggota ASEAN dan peran aktif dalam agenda keamanan arsitektur keamanan yang dipimpin oleh ASEAN.

Literatur ini kemudian membahas mengenai terbentuknya kerja sama LMC sebagai bentuk kerja sama di dalam kerangka NTS antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Hal ini kemudian membuat Tiongkok menggeser sedikit pendekatannya dalam menghadapi isu sumber daya air di Mekong dan bersifat lebih kompromi. 'Kompromi' Tiongkok pada kerja sama air membuat negara-negara Mekong akhirnya setuju untuk memperluas ruang lingkup kerja sama yang mencakup bidang politik dan keamanan. Di bawah LMC, Tiongkok telah mulai melembagakan kerja sama dalam masalah air, terutama melalui pertukaran informasi, dukungan teknologi, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan keterlibatan dengan lembaga lain yang ada seperti *Mekong River Commission* (MRC). Sebastian Biba (2018) kemudian menjelaskan bagaimana peranan dari Tiongkok sebagai inisiator dari terbentuknya kerja sama Lancang-Mekong dan menganalisa perbedaan pendekatan politik Tiongkok dengan gaya lamanya dan gaya politik barunya terhadap negara-negara riparian Sungai Mekong.

Biba beranggapan bahwa Tiongkok dalam kebijakannya, tidak selalu bersikap *uncooperative*, hal ini dibuktikan bahwa Tiongkok terbuka terhadap *water-sharing* dengan Kazakhstan dan Rusia. Tiongkok lebih mengedepankan kerja sama bilateral dengan negara-

negara riparian dan membentuk MoU terkait dengan data hidrologi dengan negara-negara hilir, terutama jika berkaitan dengan *floods warning*. Biba kemudian menganalisa hidropolitik Tiongkok dan menetapkan untuk mengevaluasi LMC (*Lancang-Mekong Cooperation*) sehubungan dengan perubahan potensial Tiongkok menuju strategi hidropolitik yang lebih aktif dan lebih preventif mengenai Mekong dengan membandingkannya dengan pendekatan pra-LMC Tiongkok.

Afriliani (2015) kemudian menjelaskan mengenai hidropolitik Tiongkok sebagai perwujudan implementasi kepentingan sumber daya airnya. Di dalam penelitiannya ini, menganalisa tentang bagaimana Tiongkok untuk memenuhi kepentingannya di Sungai Mekong menginisiasi LMC pada tahun 2015 dan merupakan perwujudan dari strategi hidropolitik Tiongkok. Literatur ini mengulik tentang bagaimana dinamika kebijakan dari Tiongkok dan potensinya terhadap pemberdayaan sumber daya air melalui kerja sama dibawah inisiasi LMC. Kemudian, kerja sama yang dijalin juga berkaitan dengan dinamika Tiongkok untuk memperkuat posisi wilayahnya yaitu Yunnan dan Guangxi Zhuang yang terhimpit dan membutuhkan jalur Sungai Mekong di Asia Tenggara.

Dalam menjelaskan keterkaitan **keamanan air di Sungai Mekong**, Michelle Ribka dan Anak Agung Banyu Perwita (2017) mencoba melihat pentingnya keamanan air dan berargumen bahwa kegagalan pengelolaan air di salah satu sungai terbesar di dunia ini akan menimbulkan pola perseteruan yang parah bahkan konflik di Asia Tenggara. Keamanan air yang merupakan bagian dari dimensi keamanan lingkungan dapat memiliki dampak destabilisasi yang serius terhadap keamanan regional dan internasional. Literatur ini kemudian memfokuskan kepada permasalahan kesalahan pengelolaan air di Sungai Mekong dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya interkoneksi di antara negara-negara untuk mengatasi masalah yang saling berhubungan ini dalam komitmen kolektif yang akan menyebabkan ketidakstabilan di seluruh wilayah.

Richard Grünwald (2018) beranggapan untuk mengatasi keamanan air yang terjadi pada kawasan Sungai Mekong diperlukan hidrokrasi dan hal ini yang dimanfaatkan oleh Tiongkok. Oleh karena itu, aliran air lintas batas menjadi medan pertempuran dimana semua negara mencoba untuk membenarkan kebijakan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan sumber daya air mereka. Tiongkok kemudian memiliki hidrokrasi untuk membenarkan

kepentingannya di Mekong, yang dimana menggunakan pembangunan bendungan sebagai instrumen *soft-power* diplomasi air Tiongkok. Hidrokasi Tiongkok ini kemudian berimplikasi langsung terhadap pembangunan dan keamanan air sungai, dan secara bersamaan mengembangkan pengaruh Tiongkok di Mekong. Selain itu, Tiongkok dengan keras mempromosikan LMC sebagai perpanjangan dari MRC sebagai sarana dan ditujukan untuk memenuhi kerja sama untuk menunjang kepentingan sumber daya Tiongkok.

Penjelasan dari latar belakang dan beberapa literatur di atas memiliki hal untuk diteliti oleh penulis, yaitu keterkaitan geopolitik dan geostrategis Tiongkok di Tibet mengenai sumber daya strategis air dan pengaruhnya terhadap keamanan air dari negara-negara riparian Sungai Mekong. Peneliti melihat adanya *loopholes* dari penelitian-penelitian sebelumnya kurang menjelaskan hubungan tersebut dan hal ini yang akan diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini kemudian yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana geopolitik dan geostrategis Tiongkok terkait sumber daya strategis air di Tibet dan implikasinya terhadap keamanan air negara-negara riparian Sungai Mekong.

## 1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan dari kepentingan nasional dari Tiongkok, akan sekuritisasi keamanan airnya berimplikasi langsung terhadap strategi geopolitik yang dibentuk oleh Tiongkok terhadap Tibet. Dataran tinggi Qinghai-Tibet merupakan sumber mata air yang sangat penting bagi Tiongkok, dan merupakan sanitasi utama sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia ini. Tibet berfungsi sebagai sumber dari 10 sistem sungai utama Asia, hal ini kemudian dimanfaatkan Tiongkok sebagai “penguasa” dari Tibet untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang proaktif dan memanfaatkan Tibet untuk meningkatkan hegemoni Tiongkok di Sungai Mekong terhadap negara-negara riparian lainnya dengan melakukan hidropolitik dan berdampak terhadap keamanan air di kawasan. Dari penjelasan tersebut, hal ini menimbulkan pertanyaan: **“Bagaimana Geopolitik dan Geostrategis Tiongkok Terkait Penguasaan Sumber Daya Strategis Air di Tibet memengaruhi Keamanan Air Negara-Negara Riparian Sungai Mekong?”**

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang telah penulis jelaskan di atas, hal ini kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengetahui bentuk dan upaya strategi geopolitik dan geostrategis Tiongkok terkait sumber daya strategis air di Tibet dan pengaruhnya terhadap negara-negara riparian sungai Mekong.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dari topik skripsi dan analisa yang dilakukan oleh penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti:

### 1.4.1. Manfaat Akademis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang akademik terutama literatur hubungan internasional terkait geopolitik Tiongkok sebagai *new emerging power* dan hegemoni di Kawasan Asia, terutama dalam kasus Tibet. Peneliti mengharapkan dapat memberikan kontribusi pandangan ilmu pengetahuan yang baru bagi civitas universitas, khususnya kepada mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dan juga program studi Hubungan Internasional dari kampus lainnya.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi saran dan informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk memahami geopolitik Tiongkok dan *water security*-nya di Tibet. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap civitas akademika lainnya dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik penelitian mengenai bagaimana strategi geopolitik dari Tiongkok dan keamanan air di Tibet. Penulis akan menjelaskan mengenai poin-poin penting yang melatarbelakangi strategi dari Tiongkok tersebut terhadap keamanan air di Tibet, hal ini kemudian akan berkaitan dan memiliki integrasi terhadap kebijakan-kebijakan dari Tiongkok di Tibet yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya airnya terhadap keamanan air negara-negara riparian sungai Mekong.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan karya tulis ilmiah terdahulu yang memiliki pembahasan yang berkaitan dan memiliki hubungan terkait dengan topik yang diambil dalam penulisan ini. Karya tulis ilmiah yang penulis gunakan sebagai bahan tinjauan pustaka adalah skripsi, dan jurnal ilmiah. Selain itu untuk mempermudah dalam melakukan penulisan, penulis mencantumkan kerangka pemikiran dan alur pemikiran. Terakhir, penulis juga mencantumkan asumsi yang merupakan landasan penulisan yang dilakukan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian digunakan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data dan menyelesaikan penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri atas jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

## **BAB IV STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGIS TIONGKOK TERKAIT SUMBER DAYA STRATEGIS AIR DI TIBET**

Bab ini membahas mengenai bagaimana geopolitik dan geostrategis Tiongkok di kawasan Tibet mengenai sumber daya air, dan menganalisa langkah-langkah dan kebijakan dari Tiongkok tersebut untuk memenuhi kepentingan dari Tiongkok akan kebutuhan sumber daya strategis airnya.

## **BAB V DOMINASI TIONGKOK DI SUNGAI MEKONG**

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dari hidropolitik Tiongkok sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakannya dan konsekuensinya terhadap keamanan air negara-negara riparian Sungai Mekong.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**